

**TINJAUAN YURIDIS PEMBERLAKUAN BATAS
KECEPATAN BAGI PENGGUNA JALAN TOL MELALUI
E – TILANG BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR
22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN**

SKRIPSI

Oleh:

Cyndi Novia Ramadhani

2012010117003



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Pemberlakuan Batas Kecepatan Bagi Pengguna Jalan Tol Melalui E-Tilang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Nama Mahasiswa : Cyndi Novia Ramadhani

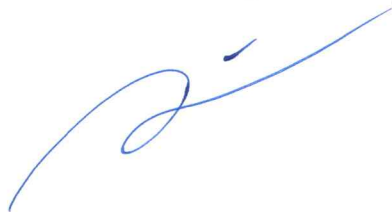
Nomor Pokok Mahasiswa : 202010117003

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Jakarta, 02 Agustus 2023

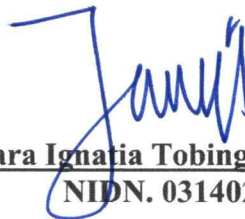
MENYETUJUI,

Pembimbing I



Dr. Dwi Seno Wijanarko, S.H., M.H.
NIDN. 0331017006

Pembimbing II



Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H.
NIDN. 0314029002

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Pemberlakuan Batas Kecepatan
Bagi Pengguna Jalan Tol Melalui E-Tilang
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Nama Mahasiswa : Cyndi Novia Ramadhani

Nomor Pokok Mahasiswa : 202010117003

Program Studi/Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 27 Juli 2023

Jakarta, 02 Agustus 2023

MENGESAHKAN,

Ketua Tim Penguji : Irjen Pol. (Purn) Prof. Dr. Drs., H.
Bambang Karsono, S.H., M.M.
NIDK. 8834980018

Penguji I : Dr. Amalia Syauket, S.H., M.Si.
NIDN. 0303116302

Penguji II : Dr. Sugeng, S.H., M.H.
NIDN. 0304027301

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum


Diana Fitriana, S.H., M.H.
NIDN. 0424039003

Dekan
Fakultas Hukum


Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H.
NIDN. 0403096602

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Cyndi Novia Ramadhani
NPM : 2012010117003
TTL : Surabaya, 29 November 2000
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Tinjauan Yuridis Pemberlakuan Batas Kecepatan Bagi Pengguna Jalan Tol Melalui E-Tilang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 02 Agustus 2023
Yang membuat pernyataan,



Cyndi Novia Ramadhani
NPM. 202010117003

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Cyndi Novia Ramadhani
Nomor Pokok Mahasiswa : 202010117003
Tempat Tanggal Lahir : Surabaya, 29 November 2000
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **TINJAUAN YURIDIS PEMBERLAKUAN BATAS KECEPATAN BAGI PENGGUNA JALAN TOL MELALUI E-TILANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 02 Agustus 2023
Yang membuat pernyataan,



Cyndi Novia Ramadhani
NPM. 202010117003

v

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS PEMBERLAKUAN BATAS KECEPATAN BAGI PENGGUNA JALAN TOL MELALUI E – TILANG BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN, CYNDI NOVIA RAMADHANI

Peningkatan pelanggaran lalu lintas menjadi tantangan baru bagi pihak Kepolisian untuk mampu menerapkan sanksi yang mendidik namun tetap memiliki efek jera. Salah satu cara untuk menekan pelanggaran adalah dengan melakukan sanksi administratif (tilang) yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Oleh karena itulah kemudian Kepolisian Republik Indonesia menerapkan sistem baru bernama *Elektronik Traffic Law Enforcement* (ETLE), atau masyarakat mengenal dengan istilah E-tilang.

Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dalam menerapkan batas kecepatan bagi pengguna jalan tol; dan untuk mengetahui bentuk dan mekanisme penerapan sistem E – Tilang di Indonesia berdasarkan Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode normatif yaitu melihat dan menganalisa dari sudut peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang berlaku.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah sistem penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dalam menerapkan batas kecepatan bagi pengguna jalan tol sebagai bagian dari lalu lintas, tak luput dari penggunaan ETLE. Schubungan dengan penggunaan ETLE di jalan tol, penerapan sistem ETLE sangat penting di jalan tol, sebab fungsinya tidak hanya untuk mengawasi pelanggaran yang dilakukan pengemudi mobil, tetapi juga untuk mengurangi potensi kecelakaan di ruas jalan tol tersebut. Beberapa ruas jalan tol dipasang kamera CCTV. Pemasangan kameraintai untuk tilang elektronik tersebut merupakan hasil kolaborasi antara pihak kepolisian dengan pengelola jalan tol. Pihak Korlantas Polri bekerja sama dengan Jasa Marga untuk memperlakukan tilang elektronik atau *electronic traffic law enforcement* (ETLE). Kemudian, bentuk dan mekanisme penerapan sistem E – Tilang di Indonesia berdasarkan Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 secara keseluruhan tidak jauh berbeda dengan tilang biasa, hanya saja dalam sistem E-Tilang pembayaran denda tidak dilakukan secara manual dan data pelanggaran dimasukkan dalam perangkat elektronik. Adapun mekanisme singkat ETilang sebagai berikut: a. Petugas melakukan penindakan terhadap pelanggar b. Petugas memasukkan data pelanggaran ke dalam aplikasi ETilang c. Pelanggar mendapat sms nomor pembayaran d. Pelanggar membayar dan mengambil bukti pembayaran e. Pelanggar menyerahkan bukti pelanggaran untuk ditukarkan dengan barang bukti yang disita f. Pengadilan memutuskan nominal denda tilang dan kejaksaan mengeksekusi putusan sidang g. Pelanggar mendapat sms jika terdapat sisa pembayaran denda.

Kata Kunci: Tilang, E-Tilang, Aturan Hukum

ABSTRACT

JURIDICAL REVIEW OF ENFORCEMENT OF SPEED LIMITS FOR TOLL ROAD USERS THROUGH E-FICTION BASED ON LAW NUMBER 22 OF 2009 CONCERNING TRAFFIC AND ROAD TRANSPORT, CYNDI NOVIA RAMADHANI

The increase in traffic violations is a new challenge for the Police to be able to apply educational sanctions but still have a deterrent effect. One way to suppress violations is to carry out administrative sanctions (tickets) carried out by the police. That's why the Indonesian National Police implemented a new system called Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), or the public is familiar with the term E-tilang.

Therefore this study aims to determine the law enforcement system carried out by the government in imposing speed limits for toll road users; and to find out the form and mechanism of implementing the E-Tilang system in Indonesia based on Law Number 22 of 2009. This research was conducted using a normative method, namely viewing and analyzing from the point of view of laws and regulations and applicable norms.

The results of this study are that the law enforcement system implemented by the government in imposing speed limits for toll road users as part of traffic, is not spared from the use of ETLE. In relation to the use of ETLE on toll roads, the application of the ETLE system is very important on toll roads, because its function is not only to monitor violations committed by car drivers, but also to reduce the potential for accidents on these toll roads. CCTV cameras have been installed on several toll roads. The installation of surveillance cameras for electronic ticketing is the result of collaboration between the police and toll road managers. Korlantas Polri is working with Jasa Marga to treat electronic traffic ticket or electronic traffic law enforcement (ETLE). Then, the form and mechanism for implementing the E-ticket system in Indonesia based on Law Number 22 of 2009 as a whole is not much different from ordinary ticketing, except that in the E-Ticket system payment of fines is not done manually and violation data is entered in an electronic device. The short mechanism for ETilang is as follows: a. Officers take action against violators b. The officer enters violation data into the ETilang application c. Violators receive SMS payment numbers d. Violators pay and take proof of payment e. The violator submits evidence of the violation in exchange for the confiscated evidence f. The court decides the nominal fine for the ticket and the attorney executes the trial decision g. Violators receive an sms if there is remaining payment of fines.

Keywords: Speed Tickets, E-Tickets, Legal Rules

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan kasih sayangnya yang selalu melimpah terhadap penulisan skripsi ini. Penulisan ini mengangkat skripsi ini dengan judul **TINJAUAN YURIDIS PEMBERLAKUAN BATAS KECEPATAN BAGI PENGGUNA JALAN TOL MELALUI E-TILANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.**

Penulisan skripsi ini tidak akan berjalan tanpa bantuan serta dorongan dari banyak pihak, oleh karena itu dengan tulus penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

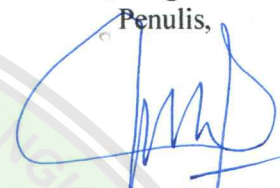
1. Inspektur Jendral Polisi (Purn) Prof. Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Rr. Dijan Widijowari, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Diana Fitriana, S.H., M.H., Selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
4. Dr. Dwi Seno Wijanarko, S.H., M.H., Selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan kontribusi, masukan, sumbangan pemikiran, motivasi serta waktu yang diluahkan untuk membimbing saya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H., Selaku Dosen Pembimbing II sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan kontribusi, masukan, sumbangan pemikiran, motivasi serta waktu yang diluahkan untuk membimbing saya.
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan.
7. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan pelayanan demi kelancaran segala urusan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Rudy Sulistiawan dan Ibu Siti Khalimah selaku kedua orang tua yang mendukung dan mendoakan penulis sekaligus sebagai motivasi penulis untuk

menyelesaikan Pendidikan S1 Ilmu Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulis pun menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam menyusun skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran, masukan serta kritik yang berguna agar skripsi ini dapat lebih baik lagi kedepannya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan bagi pihak yang berkepentingan.

Jakarta, Agustus 2023

Penulis,



Cyndi Novia Ramadhani
NPM. 202010117003



DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	8
1.5. Kerangka Konseptual	8
1.6. Kerangka Teoritis	9
1.7. Kerangka Pemikiran	15
1.8. Penelitian Terdahulu.....	16
1.9. Metode Penelitian.....	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	24
2.1. Tinjauan Umum Tentang Pelanggaran Lalu Lintas	24
2.2. Penegakan Hukum Lalu Lintas Menurut Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	32

2.3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Lalu Lintas . 35

BAB III OBJEK PENELITIAN 41

3.1. Sistem E-Tilang Dalam Pelanggaran Lalu Lintas 41

3.2. Dasar Peraturan Tilang Melalui CCTV Disinkronkan Dengan Undang-Undang Lalu Lintas 47

3.3. Regulasi E-Tilang Dalam Kerangka Hukum Pidana..... 49

BAB IV HASIL PEMBAHASAN DAN PEMBAHASAN 553

4.1. Sistem Penegakan Hukum yang Dilakukan oleh Pemerintah Dalam Menerapkan Batas Kecepatan Bagi Pengguna Jalan Tol 53

4.2. Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas Dengan E-Tilang . 60

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 70

5.1. Kesimpulan 70

5.2. Saran 72

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP